

Model Jaringan Komunikasi Berantas Korupsi

Sri Narti, Vethy Octaviani

Abstrak

Korupsi dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di Indonesia dan akhirnya korupsi menjadi bagian dari *way of live*. Seperti tiga kasus korupsi yang menjerat tiga Gubernur Bengkulu. Layaknya estafet, tiga gubernur yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi. Begitu membudayanya tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia membuat masyarakat tidak sadar bahwa korban yang paling dirugikan sebenarnya adalah rakyat. Dan kita selalu beranggapan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah. Pernyataan seperti itu tidaklah benar. Justru masyarakat seharusnya berperan penting ketika kita semua turut terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.. Penulis berasumsi bahwa proses pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya bersandar pada pemerintah saja jika memang kita ingin memberantas korupsi, tetapi harus berkesinambungan antar pemerintah yang harus dibuktikan dengan adanya kepemimpinan yang kuat dalam pemberantasan korupsi tersebut disertai dengan blueprint serta langkah yang sistematis. Pentingnya penelitian ini dilakukan, supaya masalah dan kasus-kasus korupsi yang selama ini belum terungkap ke permukaan, maka dengan hadirnya temuan model jaringan komunikasi berantas korupsi dalam penelitian ini akan segera mengungkap kasus-kasus yang selama ini masih menjadi fenomena gunung es. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menciptakan model jaringan komunikasi yang dirancang untuk Indonesia bebas korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Pada tahap awal, dilakukan studi dokumentasi guna melacak peta persoalan yang ada selama ini. Seperti dokumentasi dan kepustakaan meliputi artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, penelitian-penelitian tentang korupsi baik yang terpublikasi maupun tidak, laporan tahunan KPK, studi-studi lembaga independen, undang-undang, dan lain sebagainya. Kedua, *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam penelitian ini, FGD sebatas digunakan sebagai alat mengumpulkan data. FGD dilakukan dengan mengundang berbagai ahli, pengamat, aktivis, akademisi, praktisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang korupsi. Ketiga, wawancara mendalam yang dilakukan guna melakukan eksplorasi atas berbagai persoalan yang ada dalam dunia korupsi, baik perangkat desa, pemuka pendapat, pemerintah daerah, pemerintah kota, dan perwakilan regulator. Keempat, metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain. Kegiatan yang penulis usulkan dalam pemberantasan korupsi ini adalah supaya pemerintah segera membentuk komisi-komisi kecil yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, semacam perpanjangan tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang nantinya akan ditempatkan di setiap birokrasi dan masyarakat. Tentunya mereka adalah orang-orang terpilih dari KPK yang bertugas sebagai pengawas semua kegiatan yang ada di birokrasi dan juga masyarakat untuk memberikan informasi yang berbau korupsi di setiap birokrasi yang ada kepada KPK Pusat. Namun, perlu adanya perlindungan dari KPK bagi mereka yang terpilih dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum misalnya undang-undang perlindungan bagi pelapor. Dengan demikian, masyarakat akan berpartisipasi membantu KPK dalam memusnahkan korupsi di tanah air kita ini.

Kata Kunci: Model Jaringan Komunikasi, Berantas, Korupsi.

Abstract

Corruption is considered a common thing in Indonesia and eventually corruption becomes part of the way of life. Such as the three corruption cases that ensnared three Bengkulu governors. Like a relay, three governors were arrested for committing corruption. Such is the prevalence of corruption (tipikor) in Indonesia that people do not realise that the real victims are the people. And we always assume that the problem of corruption is the responsibility of the government. Such a statement is not true. Instead, the community should play an important role when we all get involved in efforts to prevent and eradicate corruption. The author assumes that the process of eradicating corruption in Indonesia does not only rely on the government alone if we really want to eradicate corruption, but must be sustainable between governments which must be proven by strong leadership in eradicating corruption accompanied by a

blueprint and systematic steps. The importance of this research is that the problems and cases of corruption that have not been revealed to the surface, so that the presence of the findings of the corruption eradication communication network model in this study will immediately reveal cases that have so far been an iceberg phenomenon. The purpose of this research is to create a communication network model designed for a corruption-free Indonesia. This research was conducted using the triangulation method. In the initial stage, a documentation study was conducted to trace the map of existing problems so far. Such documentation and literature include articles published in scientific journals, studies on corruption both published and unpublished, KPK annual reports, studies of independent institutions, laws, and so on. Second, Focus Group Discussion (FGD). In this research, FGDs are used as a data collection tool. FGDs are conducted by inviting various experts, observers, activists, academics, practitioners, and non-governmental organisations (NGOs) in the field of corruption. Third, in-depth interviews were conducted to explore various issues in the world of corruption, including village officials, opinion leaders, local governments, city governments, and representatives of regulators. Fourth, the normative juridical method is carried out through literature studies that examine (mainly) secondary data in the form of laws and regulations and others. The activity that the author proposes in the eradication of corruption is for the government to immediately form small commissions that are directly related to the prevention and eradication of corruption, a kind of extension of the Corruption Eradication Commission (KPK) which will be placed in every bureaucracy and society. Of course, they are selected people from the KPK who are tasked with supervising all activities in the bureaucracy and also the community to provide information about corruption in each bureaucracy to the Central KPK. However, there needs to be protection from the KPK for those selected in carrying out their respective duties. The government should provide legal protection, such as a whistleblower protection law. Thus, the public will participate in helping the KPK in eradicating corruption in our homeland.

Keywords: Communication Network Model, Eradicate Corruption.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan musuh utama negara-negara di dunia pasca era penjajahan karena korupsi dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakefisienan dalam birokrasi yang berakibat pada pemerintahan yang buruk, meningkatnya kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya serta melemahnya tatanan masyarakat. Korupsi adalah bentuk perampokan uang dan hak-hak rakyat yang masuk ke kantong koruptor yang memberi akibat langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan pembangunan yang sangat dalam. Jika dilihat dari segi semantik, kata korupsi berasal dari bahasa Inggris '*Corrupt*', dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *Com* yang berarti bersama-sama dan *Rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Pada praktiknya, korupsi dapat dilihat sebagai penerimaan uang yang berhubungan dengan jabatan tanpa tercatat dalam administrasi.

Sebenarnya korupsi telah lama ada di Indonesia, hal ini disebabkan karena semenjak zaman penjajahan Belanda budaya korupsi itu sudah ada seperti praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, yang oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di Indonesia dan akhirnya korupsi menjadi bagian dari *way of live*. Begitu membudayanya tidak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia membuat masyarakat tidak sadar bahwa korban yang paling dirugikan sebenarnya adalah rakyat. Yakni kita semua. Runtuhnya nilai-nilai, macam macam norma, etika, moral, budaya dan religi di suatu wilayah memang sangat berpengaruh pada perkembangan tipikor. Bahkan sering kali perilaku kita mengarah ke korup tanpa kita mengerti bahwa tindakan tersebut masuk dalam delik pidana korupsi. Keterbatasan pemahaman

an mengenai korupsi telah membentuk image bahwa korupsi di negara kita sulit untuk dicegah ataupun diberantas. Dan kita selalu beranggapan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah. Pernyataan seperti itu adalah salah besar. Justru masyarakat seharusnya berperan penting ketika kita semua turut terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penindakan terhadap koruptor patut diberi apresiasi, KPK telah memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan hanya pejabat di lingkungan eksekutif, tetapi juga pejabat di lingkungan legislatif bahkan yudikatif, yang juga punya fungsi penindakan, tidak lepas dari jerat KPK.

Hanya saja, kasus-kasus yang ditangani oleh KPK masih seperti fenomena gunung es. Karena dari dahulu hingga saat ini korupsi masih merajalela, terlihat dari masih banyaknya kasus-kasus yang belum selesai dan belum terungkap mulai dari kasus kecil hingga kasus korupsi terbesar. Hal ini tidaklah mudah, karena sudah mengakar di negara kita. Dimana-dimana kita dengan maraknya kasus korupsi dari lembaga desa, daerah, dan bahkan kota.

Selanjutnya, pada 17 Desember 2012, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik Junaidi sebagai Gubernur Bengkulu definitif menyusul adanya keputusan MA yang menolak peninjauan kembali (PK) Agusrin. Hampir selama tiga tahun menjabat, lagi-lagi Gubernur Bengkulu tersandung kasus korupsi. Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri menetapkan status tersangka terhadap Junaidi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SK pembayaran honor Tim Pembina RSUD M Yunus, Bengkulu. Kasubdit I Dittipidkor Kombes Adi Deriyen Jayamarta mengatakan korupsi yang disangkakan kepada Junaidi terkait dengan penerbitan surat keputusan (SK) pembayaran honor Tim Pembina RSUD M Yunus, Bengkulu, pada 2011 yang nilai proyeknya mencapai Rp 5,4 miliar. Belum berhenti sampai di situ, Gubernur Bengkulu yang baru saja dilantik pada 2016, Ridwan Mukti, diduga melakukan tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan diduga ada transaksi yang terjadi antara pihak swasta dan pihak yang terkait dengan penyelenggara negara saat OTT di Bengkulu. "Kami mengamankan 5 orang di lokasi (OTT). Diduga ada transaksi yang terjadi antara pihak swasta dan pihak terkait penyelenggara negara setempat. Tim juga mengamankan sejumlah uang dalam mata uang rupiah di dalam 1 kardus," kata Febri saat dimintai konfirmasi. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima pejabat di Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pegawai swasta. Dua di antaranya diduga Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari. Bukan kali pertama ini pejabat di Provinsi Bengkulu tersandung kasus korupsi.

Jika dilihat dari perspektif ilmu komunikasi, ada yang namanya jaringan komunikasi, seperti komisi-komisi kecil yang merupakan perpanjangan tangan dari KPK ini dapat dikatakan sebagai jaringan komunikasi, yang bertugas mengawas dan memberikan informasi kepada KPK Pusat. Menurut Rogers (1983) jaringan komunikasi adalah suatu jaringan yang terdiri atas individu-individu yang saling berhubungan, yang dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpol. Pentingnya penelitian ini dilakukan, supaya kasus-kasus korupsi yang selama ini belum terungkap ke permukaan, maka dengan hadirnya temuan model jaringan komunikasi dapat membantu memberantas korupsi. Sehingga penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian ini pada model jaringan komunikasi yang dirancang untuk Indonesia bebas korupsi.

KAJIAN LITERATUR

Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan bentuk fenomena masyarakat yang bisa kita temui dimanapun. Pengertian korupsi seolah-olah selalu berkembang dan berubah sesuai zamannya (Prodjohamindjojo, 2001), karena dalam sejarah setiap negara pasti dihadapkan pada masalah korupsi dari masa pergantian waktu dan kepemimpinan suatu negara. Menurut Lubis dan Scott (1997) korupsi adalah tingkahlaku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang

lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.

Jaringan Komunikasi

Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Jaringan ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, kelompok kecil sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya akan mengembangkan pola komunikasi yang menggabungkan beberapa struktur jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini kemudian merupakan sistem komunikasi umum yang akan digunakan oleh kelompok dalam mengirimkan pesan dari satu orang. Kedua, jaringan komunikasi ini bisa dipandang sebagai struktur yang diformalkan dan diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi kelompok.

Beberapa pengertian jaringan komunikasi menurut beberapa ahli dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Pengertian jaringan komunikasi menurut Rogers (1983) adalah suatu jaringan yang terdiri atas individu-individu yang saling berhubungan yang dilambangkan oleh arus komunikasi yang terpola.
- b. Hanneman dan Mc Ever dalam Djamali (1999) menyatakan bahwa jaringan komunikasi adalah pertukaran informasi yang terjadi secara teratur antara dua orang atau lebih.

Analisis Jaringan Komunikasi Rogers dan Kincaid (1981) menjelaskan bahwa analisis jaringan komunikasi adalah merupakan metode penelitian untuk mengidentifikasi struktur komunikasi dalam suatu sistem, dimana data hubungan mengenai arus komunikasi dianalisa menggunakan beberapa tipe hubungan-hubungan interpersonal sebagai unit analisa. Tujuan penelitian komunikasi menggunakan analisis jaringan komunikasi adalah untuk memahami gambaran umum mengenai interaksi manusia dalam suatu sistem. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam analisis jaringan komunikasi adalah :

- (1) Mengidentifikasi klik dalam suatu sistem,
- (2) Mengidentifikasi peranan khusus seseorang dalam jaringan komunikasi, misalnya sebagai liaisons, bridges dan isolated
- (3) Mengukur berbagai indikator (indeks) struktur komunikasi, seperti keterhubungan klik, keterbukaan klik, keintegrasian klik, dan sebagainya.

Klik dalam jaringan komunikasi adalah bagian dari sistem (sub sistem) dimana anggota-anggotanya relatif lebih sering berinteraksi satu sama lain dibandingkan dengan anggota-anggota lainnya dalam sistem komunikasi (Rogers dan Kincaid, 1981). Dalam proses difusi, untuk mendapatkan informasi bagi anggota kelompok, dalam jaringan komunikasi terdapat peranan-peranan sebagai berikut (Rogers dan Kincaid, 1981) : (1) *Liaison Officer* (LO), yaitu orang yang menghubungkan dua atau lebih kelompok/sub kelompok, akan tetapi LO bukan anggota salah satu kelompok/sub kelompok. (2) *Gate keeper*, yaitu orang melakukan *filtering* terhadap informasi yang masuk sebelum dikomunikasikan kepada anggota kelompok/sub kelompok. (3) *Bridge*, yaitu anggota suatu kelompok/sub kelompok yang berhubungan dengan kelompok/ sub kelompok lainnya. (4) *Isolate*, yaitu mereka yang tersisih dalam suatu kelompok/sub kelompok (5) *Kosmopolit*, yaitu seseorang dalam kelompok/sub kelompok yang menghubungkan kelompok/sub kelompok dengan kelompok/sub kelompok lainnya atau pihak luar. (6) *Opinion Leader*, yaitu orang yang menjadi pemuka pendapat dalam suatu kelompok/sub kelompok.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan

teknik triangulasi.. Pada tahap awal, dilakukan studi dokumentasi guna melacak peta persoalan yang ada selama implementasi Undang-undang anti korupsi. Isu-isu yang dipetakan yaitu kegagalan implementasi undang-undang tersebut. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan kepustakaan meliputi artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, penelitian-penelitian tentang korupsi baik yang terpublikasi maupun tidak, laporan tahunan KPK, studi-studi lembaga independen, undang-undang, dan lain sebagainya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber dokumentasi yang dikeluarkan oleh berbagai pihak, yang berkaitan dengan korupsi. Kedua, Focus Group Discussion (FGD). Dalam penelitian ini, FGD sebatas digunakan sebagai 'alat' mengumpulkan data. FGD dilakukan dengan mengundang berbagai ahli, pengamat, aktivis, akademisi, praktisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). FGD ini dilakukan guna menangkap persoalan-persoalan pokok yang menyangkut peta persoalan korupsi di Indonesia, persoalan yang ada dalam undang-undang sehingga, sepertinya belum mampu mendorong bersihnya pemerintahan sebagaimana yang diharapkan dan persoalan apa yang dihadapi oleh lembaga regulator tersebut sehingga undang-undang anti korupsi gagal diimplementasikan serta merancang model jaringan komunikasi utamanya untuk Indonesia bebas korupsi. Ketiga, wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan berbagai narasumber untuk melacak konteks persoalan yang muncul berkaitan dengan implementasi undang-undang. Wawancara dilakukan guna melakukan eksplorasi atas berbagai persoalan yang ada dalam dunia korupsi, baik perangkat desa, pemuka pendapat, pemerintah daerah, pemerintah kota, dan perwakilan regulator. Keempat, metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang terkait dengan implementasi UU anti korupsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Studi jaringan komunikasi memberi penekanan pada relasi antara satu aktor dengan aktor yang lain dalam struktur sosial tertentu. Wasserman dan Faust (1994:2) lebih detail menjelaskan bahwa jaringan komunikasi terdiri dari seperangkat aktor (*node*) dan hubungan (*ties*) diantara aktor. Actor (*node*) dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Sedangkan hubungan (*ties*) mungkin terjadi diantara individu dengan individu atau terjadi diantara individu dengan kelompok tertentu dan seterusnya. Dalam perspektif komunikasi, hubungan diantara aktor merupakan dimensi yang sangat penting dan prinsip. Katz, dikk (2004: 308) menjelaskan bahwa melalui hubungan yang terjadi diantara actor akan menggambarkan jenis-jenis ikatan yang muncul. Berbagai jenis ikatan yang mungkin muncul, antara lain; ikatan hubungan komunikasi (siapa berbicara kepada siapa atau siapa yang memberi informasi atau saran kepada siapa), ikatan formal (siapa yang melapor kepada siapa) ikatan afektif (siapa yang menyukai siapa atau siapa yang mempercayai siapa), ikatan kedekatan (dekat secara spasial atau secara elektronik) dan hubungan kognitif (siapa yang tahu siapa yang mengenalnya). Dalam kebanyakan penelitian jaringan, suatu kelompok kecil yang biasanya terdiri dari lima orang yang diberi tugas, dan kelompok ini berfungsi dalam komunikasi yang terkendalikan. Sehingga dengan adanya komisi ini nanti, dapat membantu dan mempermudah tugas KPK dalam pemberantasan korupsi.

Sejauh ini, usaha dari kelompok-kelompok *civil society* sudah cukup banyak dilakukan. Seperti gerakan kampanye yang sifatnya hanya pencegahan karena langkah ini harus diperkuat lagi dalam implementasinya. Pendidikan korupsi, maka instansi pendidikan memiliki peran yang sangat penting, seperti melakukan pengkayaan dalam mengemas pendidikan antikorupsi menjadi bentuk-bentuk aplikatif melalui kesadaran diri yang perlu dibangun bahwa korupsi

adalah kejahatan kemanusiaan yang bersifat *extraordinary crime* yang tentunya hal ini harus ditumbuhkan mulai dari masa perkuliahan sebagai modal diri untuk melawan korupsi, selanjutnya keberanian untuk tegas, sudah seharusnya ditanamkan sejak dini di ruang-ruang kelas pembelajaran, dan melawan praktik korupsi, generasi muda dapat mencontoh keberanian sikap dari tokoh seperti Novel Baswedan dan Baharuddin Lopa yang merupakan *figure* pemberani melawan korupsi di era orde Baru dan masa transisi reformasi. Ketiga hal ini tentunya tidak hanya disampaikan secara teoritis lewat *text book* saja di ruang-ruang kelas oleh para dosennya namun ke setiap individu-individu mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus diperbanyak dengan praktik yang bersifat aplikatif. Hal yang biasa dilakukan mulai dari organisasi kemahasiswaan, di mana setiap ketua dan pengurus organisasi harus berani berkomitmen untuk berjanji membuat penyatuan dan sikap antikorupsi dalam mengelola organisasi, tentu hal ini juga harus didukung oleh rektorat sebagai pengelola institusi perguruan tinggi. Supaya mahasiswa berani bersikap antikorupsi dan berani melawan korupsi dengan adanya pengakuan legal dari pihak kampusnya, jika KPK saja sudah mampu melahirkan kantin kejujuran di sekolah dasar maka perguruan tinggi juga bisa melahirkan program berani jujur kepada para civitas akademiknya. Selain itu juga, mahasiswa harus memperbanyak penelitian atau riset-riset yang berkaitan dengan upaya menumbuhkan gerakan sikap antikorupsi dan simulasinya dapat dibangun melalui riset lalu dikembangkan lebih lanjut melalui program pendampingan masyarakat yang bersidaf nyata. Cara ini, merupakan salah satu langkah yang dapat dijadikan bekal bagi mahasiswa sebelum mereka terjun ke lapangan atau masyarakat yang bebas dari virus-virus korupsi dalam dirinya.

Dengan memperhatikan focus penelitian jaringan komunikasi, Marin dan Wellman (2011:3) mengemukakan tiga karakteristik penting dari penelitian jaringan yaitu ; memuaskan perhatian pada relasi bukan pada atribut, berfokus pada jaringan bukan kelompok dan relasi harus ditempatkan dalam konteks relasional tertentu. Jadi, secara umum tujuan dari analisis jaringan komunikasi adalah mencari struktur dan pola umum jaringan yang ada jauh dibawah permukaan system social. Analisis jaringan menggambarkan pola dan menggunakan deskripsi jaringan untuk mempelajari bagaimana struktur jaringan membatasi perilaku komunikasi dan perubahan sosial (Eriyanto, 2014:13)

Dalam penelitian ini, FGD dilakukan dengan mengundang berbagai ahli, pengamat, aktivis, akademis, praktisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang korupsi. FGD mengungkapkan bahwa persoalan-persoalan pokok yang menyangkut peta persoalan korupsi di Indonesia, persoalan yang ada dalam undang-undang sehingga, seperti halnya belum mampu mendorong bersihnya pemerintahan sebagaimana yang diharapkan dan persoalan apa yang dihadapi oleh lembaga regulator tersebut sehingga undang-undang anti korupsi gagal diimplementasikan serta merancang model jaringan komunikasi utamanya untuk bebas korupsi.

Selanjutnya, wawancara mendalam ini dilakukan dengan berbagai narasumber untuk melacak konteks persoalan yang muncul berkaitan dengan implementasi undang-undang. Wawancara dilakukan guna melakukan eksplorasi atas berbagai persoalan yang ada dalam dunia korupsi, baik perangkat desa, pemuka pendapat, pemerintah daerah, pemerintah kota, dan perwakilan regulator.

Informan dalam penelitian membangun komunikasi dengan anggota-anggota mulai sejak di kepengurusan anti korupsi, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan berbagai pengurus lembaga yang ada di masyarakat sehingga informan mengemukakan bahwa untuk menyikapi isu-isu korupsi yang berkembang maka dibagi menjadi dua pola kebijakan, yaitu kebijakan internal dan kebijakan eksternal, jika itu rekomendasi kasus internal

maka yang dilakukan adalah mengundang pengurus-pengurus lembaga yang ada seperti pengurus akademis dan praktisi untuk melakukan konsolidasi. Biasanya informan dan pengurus lainnya melakukan komunikasi ke atas dengan birokrasi terkait isu-isu kebijakan yang berkembang dan melakukan komunikasi ke bawah dengan konsolidasi dengan pengurus-pengurus lembaga yang ada. Informan mengatakan bahwa kalau isu tersebut sifatnya eksternal baik nasional maupun lokal maka mereka melakukan aksi tunggal. Pada aksi berikutnya baru melibatkan elemen lembaga yang mau bergabung baik itu mengatasnamakan instansi, birokrasi, maupun universitas. Kalau menyikapi isu-isu eksternal itu mengatasnamakan anti korupsi dan tidak lagi membawa nama instansi, birokrasi maupun universitas.

Pola komunikasi yang dibangun informan dengan anggota kelompok adalah berkoordinasi dengan pengurus-pengurus lembaga sekota Bengkulu dan menghadiri undangan kegiatan kegiatan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Informan selalu menjaga intensitas komunikasi dengan anggotanya. Menurut penuturan informan bahwa dalam mengumpulkan massa bukanlah hal yang sulit, karena mereka bertugas mengkoordinir massa bekerja sama dengan pengurus yang akan menggerakkan massanya untuk berjuang bersama.

Berdasarkan penjelasan informan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pola jaringan komunikasi kelompok yang selama ini digunakan informan adalah pola komunikasi yang sama dengan pola komunikasi yang digunakan oleh para pengamat yaitu berkoordinasi dengan pengurus lembaga yang ada di masyarakat sebagai arus jaringan komunikasi ke bawah dan berkoordinasi dengan pihak birokrasi tempat bekerja dalam hal ini para staf dan pimpinan birokrasi sebagai bentuk arus komunikasi ke atas dan begitupun sebaliknya. Sedangkan pengurus di masing masing tingkatan baik pengurus menggunakan pola komunikasi bebas kepada semua anggota dan pengurus. Akan tetapi tidak semua pengurus yang ada di tingkat kabupaten memiliki akses komunikasi langsung kepada pengurus, namun hal tersebut tidak terjadi antara pengurus dan pengamat. Hal ini dikarenakan oleh intensitas interaksi sosial dan komunikasi mereka tergolong tinggi. Kelompok organisasi yang ada di masyarakat khususnya LSM serta birokrasi, menggunakan dua jenis pola jaringan komunikasi kelompok, yaitu: jenis jaringan struktur rantai (*Chain*) dan jenis jaringan bebas (*All-Channel*).

Beberapa informan dari akademisi juga mengungkapkan kalau dirinya sering orasi ketika melakukan aksi unjuk rasa. Untuk menarik minat mahasiswa lainnya, informan bersama rekan-rekannya menggunakan metode pendekatan mempengaruhi persepsi mahasiswa untuk menarik minat mereka bergabung dengan organisasi persuasif, yaitu dengan cara anti korupsi lainnya. Setelah mereka selesai dikader maka mereka melakukan lagi bentuk pengawalan kader untuk mempererat rasa persaudaraan, kebersamaan, solidaritas dan kesetiakawanan dengan melakukan kajian-kajian, diskusi-diskusi, serta kegiatan-kegiatan lainnya seperti membuat acara makan-makan bersama dan mengundang semua kader kader. Pola komunikasi yang terbangun antara ketua dengan sesama pengurus dan anggota bahkan dengan kader-kader sangat terbuka dan bebas menyampaikan pendapat kepada sesama kader itu sendiri, meskipun mereka dibatasi status kepengurusan dalam lembaga. Komunikasi yang terbangun dalam aktifitas keseharian mereka tetap memperhatikan etika-etika berkomunikasi pada umumnya. Menurut pengakuan informan bahwa ketika mereka hendak melakukan aksi unjuk rasa minimal jumlah massa 10-15 orang, dan itu sudah cukup untuk berorasi. Selama informan menjabat jadi ketua ketika melakukan aksi unjuk rasa rata-rata jumlah massa yang diturunkan itu 25 orang. Berdasarkan penjelasan informan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pola jaringan komunikasi kelompok yang digunakan pengurus adalah pola komunikasi jenis jaringan bebas (*All-Channel*), dapat dilihat pada (gambar 2), yaitu bahwa semua pengurus dan anggota bisa melakukan koordinasi dan berkomunikasi langsung termasuk dengan ketua kelompok lembaga.

Hal ini terjadi karena tanpa adanya batasan interaksi dan komunikasi yang dilakukan untuk membangun kedekatan dan solidaritas pengurus dan anggota, namun etika tetap terjaga dalam setiap terjadi kontak sosial. Untuk pola jaringan komunikasi yang digunakan kelompok dalam menumbuhkan solidaritas aksi unjuk rasa mahasiswa di kota Bengkulu ada 2 (dua) jenis pola yaitu: pola jaringan komunikasi jenis struktur rantai (*Chain*) dan pola jaringan komunikasi jenis bebas (*All-channel*).

Jadi, berdasarkan hasil temuan di atas maka pola jaringan komunikasi yang digunakan kelompok, instansi atau birokrasi dalam memberantas korupsi juga bisa dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis pola yaitu: (1) Pola jaringan komunikasi jenis struktur rantai (*Chain*), dimana dikemukakan bahwa struktur rantai dikenal sebagai komunikasi sistem arus ke atas (*upward*) dan ke bawah (*downward*), yang artinya menganut hubungan komunikasi garis langsung (komando) baik ke atas atau ke bawah tanpa terjadinya suatu penyimpangan. Sistem komunikasi dalam struktur rantai sama dengan struktur lingkaran kecuali bahwa para anggota yang paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Keadaan terpusat juga terjadi di sini dan orang yang berada di posisi tengah lebih berperan sebagai pemimpin dari pada mereka yang berada di posisi lain. Dalam struktur ini, sejumlah saluran terbuka dibatasi, orang hanya bisa secara resmi berkomunikasi dengan orang-orang tertentu saja. Dan selanjutnya yaitu (2) Pola jaringan komunikasi jenis bebas (*All-channel*), dikemukakan bahwa model jaringan bebas (*All-channel*) merupakan pengembangan model lingkaran (*Circle*). Di dalam model ini semua tingkatan dalam jaringan tersebut dapat melakukan interaksi timbal balik tanpa melihat siapa yang menjadi tokoh sentralnya. Semua jaringan komunikasi antar tingkatan jenjang hierarkinya tidak dibatasi dan setiap staf atau bawahan bebas melakukan interaksi dengan berbagai pihak atau pimpinan atau sebaliknya.

Indikator jaringan komunikasi kelompok paling tinggi adalah *opinion leader* dan paling rendah *Cosmopolite*. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin kelompok (ketua-ketua lembaga, koordinator aksi atau jendral lapangan) sangat berperan dalam jaringan komunikasi. Leader adalah pemimpin informal dalam organisasi. Mereka bukanlah orang-orang yang mempunyai otoritas formal dalam organisasi tetapi membimbing tingkah laku anggota organisasi dan mempengaruhi keputusan mereka. Jaringan komunikasi paling rendah adalah *Cosmopolite* yaitu individu yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. Mereka mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang ada dalam lingkungan dan memberi informasi mengenai organisasi kepada kelompok dalam suatu lingkungan.

Jaringan komunikasi terjadi pada individu - individu dalam kelompok, mereka bereaksi satu sama lain untuk mencari informasi dan dalam pola komunikasinya ternyata ada dua orang yang menjadi penasehat atau pemuka pendapat/ pemimpin informal dan mempengaruhi keputusan mereka, karena telah dianggap mempunyai kemampuan oleh anggotanya. Pemimpin seperti ini mempunyai peranan penting dalam membantu terjadinya perubahan perilaku. Jaringan komunikasi terdiri atas individu-individu yang saling berhubungan satu sama lain melalui pola-pola arus informasi, Rogers, dkk (1981), atau melalui arus komunikasi yang terpola, Rogers (1995).

Rogers (1976) mengemukakan bahwa suatu jaringan komunikasi terjadi di antara individu-individu yang saling berhubungan satu sama lain melalui arus komunikasi yang terpola, saling mempengaruhi dan berbagi informasi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut para informan, mereka mengungkapkan seperti informasi mengenai kenaikan harga BBM, Korupsi, dll, yang sifatnya nasional itu diperoleh dari media, baik itu cetak maupun elektronik. Informasi yang diperoleh kemudian dikaji dalam diskusi sebelum

dibahas dalam rapat konsolidasi pengurus untuk menentukan sikap terhadap permasalahan atau isu yang berkembang di kalangan kader-kader.

Jahi (1993) mengemukakan bahwa jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Sedangkan hasil wawancara mendalam dengan informan dari tokoh masyarakat, menyatakan bahwa masalah korupsi bukan berarti masyarakat tidak tahu namun mereka enggan untuk menyampaikannya karena tidak ada perlindungan bagi diri pribadi mereka sehingga mereka takut atas keselamatan jiwa dan keluarga mereka terancam apabila mereka menyampaikannya. Hal ini juga disampaikan oleh tokoh masyarakat yang lainnya yang berpendapat bahwa di setiap birokrasi dan instansi sebaiknya diawasi oleh perwakilan KPK yang tugasnya mengawasi setiap pekerjaan yang berlangsung mulai dari atasan hingga bawahan karena jika tidak sama saja berarti bohong sebab terkadang bawahan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh atasannya namun karena takut akhirnya dia lebih memilih diam supaya posisinya tetap aman. Dan tak jarang juga, atasan dan bawahan saling berkerjasama demi melancarkan aksi korupsi mereka.

Kegiatan yang penulis usulkan dalam pemberantasan korupsi ini adalah supaya pemerintah segera membentuk komisi-komisi kecil yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, semacam perpanjangan tangan dari komisi Pemberantas korupsi (KPK) yang nantinya akan ditempatkan di setiap birokrasi dan masyarakat. Tentunya mereka adalah orang-orang terpilih dari KPK yang bertugas sebagai pengawas semua kegiatan yang ada di birokrasi dan juga masyarakat untuk memberikan informasi yang berbau korupsi di setiap birokrasi yang ada kepada KPK pusat. Namun, perlindungan dari KPK bagi mereka yang terpilih dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Jadi, melihat hasil temuan di lapangan maka penulis menemukan model jaringan komunikasi berantas korupsi yang mungkin bisa diterapkan. Sesungguhnya, korupsi bisa saja diberantas jika pemerintah dan masyarakat bersatu namun hal itu sungguh lah sulit. Sehingga menurut penulis, perlu ada alternative lain yaitu berupa pengawasan yang ketat dalam hal ini adalah KPK. Dalam melaksanakan tugasnya KPK tidak bisa sendiri, maka KPK harus menempatkan tim KPK kecilnya di setiap instansi, birokrasi, dan masyarakat. Tim ini akan bekerja sama dan saling berinteraksi bertukar informasi mulai dari isu-isu yang beredar hingga kehidupan seseorang yang dituduh sebagai koruptor maka gerak geriknya di kantor akan diawasi dengan seksama sedangkan untuk kehidupannya di masyarakat maka ada tokoh masyarakat yang sudah ditugaskan untuk mengawasi gerak geriknya di lingkungan masyarakat supaya informasi yang terkumpul benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tim ini bisa terdiri dari 3 orang yang terdiri dari 1 orang staf KPK di birokrasi, dan 2 orang lagi diambil dari tokoh masyarakat dan LSM.

Dari gambar pola jaringan komunikasi A di atas, dapat kita lihat bahwa yang menempati posisi puncak atau teratas adalah KPK pusat selanjutnya yang berada pada posisi menengah adalah komisi-komisi KPK atau perpanjangan tangan KPK yang ditugaskan pada birokrasi-birokrasi atau instansi-instansi pemerintah. Sedangkan yang berada di posisi bawahannya adalah para praktisi, akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat yang sudah dipilih oleh KPK sendiri sebagai spionase atau mata-mata yang bertugas mengawasi dan mencari informasi yang valid seputar pelaku korupsi atau koruptor yang di duga melakukan tindakan korupsi dan informasi tersebut akan mereka kumpulkan serta sampaikan kepada perpanjangan tangan KPK atau komisi-komisi kecil KPK yang nantinya akan diteruskan kepada KPK pusat. Pola komunikasi yang digunakan oleh para komisi-komisi kecil KPK yang berada di birokrasi dan masyarakat yaitu berkoordinasi dengan pengurus lembaga yang ada di masyarakat sebagai arus jaringan

komunikasi ke bawah dan kerkoordinasi dengan pihak birokrasi tempat bekerja dalam hal ini para komisi birokrasi sebagai bentuk arus komunikasi ke atas. Akan tetapi tidak semua pengurus yang ada di tingkat kabupaten memiliki akses komunikasi langsung kepada pengurus KPK pusat, melainkan hal tersebut harus melalui komisi-komisi kecil KPK terlebih dahulu dan selanjutnya informasi yang berhasil dihimpun oleh komisi-komisi KPK tersebut akan segera disampaikan langsung kepada KPK pusat. Dikarenakan oleh intensitas interaksi sosial dan komunikasi mereka tergolong tinggi.

Kelompok organisasi yang ada di masyarakat khususnya LSM serta birokrasi selama ini hanya menggunakan dua jenis pola jaringan komunikasi kelompok, yaitu: jenis jaringan struktur rantai (*Chain*) dan jenis jaringan bebas (*All-Channel*) namun belum ada pembentukan komisi-komisi kecil KPK sebagai tempat penampungan informasi. Jika pada model ini semua tingkatan dalam jaringan tersebut dapat melakukan interaksi timbal balik tanpa melihat siapa yang menjadi tokoh sentralnya atau pusatnya sementara pada pola jaringan A sistemnya terstruktur dari bawah, menengah dan teratas. Menurut penulis, perlu kerja sama yang baik dan terstruktur dari masyarakat selanjutnya ke komisi-komisi kecil dan terakhir KPK pusat supaya informasi – informasi tentang korupsi akan dengan cepat di dapat dan KPK pusat pun akan segera mengambil tindakan. Tentu hal ini, sangat membantu dan mempermudah kerja KPK pusat dalam menyelidiki para pelaku korupsi. Menurut penulis, ide ini perlu diaplikasikan karena ketika gerak gerik kita diawasi maka biasanya orang akan bekerja dengan baik dan peluang untuk melakukan korupsi sedikit sekali. Melalui kelompok-kelompok KPK ini maka diharapkan dapat memberantas korupsi yang selama ini merajalela.

Komunikasi kelompok adalah suatu interaksi secara bertatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. SDM yang direkrut untuk komisi-komisi kecil tersebut, bukan hanya cerdas intelektual, melainkan cerdas secara emosi, jujur, adil, dan taat kepada Tuhan sang pencipta. Bukan hal yang tidak mungkin untuk mendapatkan SDM yang seperti itu ditengah menurunnya moral dan etika masyarakat saat ini. Tentu hal ini, harus melewati seleksi dan kompetisi yang ketat oleh KPK. Namun, perlu adanya perlindungan dari KPK bagi mereka yang terpilih dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum misalnya undang-undang perlindungan bagi pelapor. Dengan demikian, berbagai informasi dugaan korupsi akan dilaporkan oleh masyarakat. Jika KPK Pusat saja bekerja keras untuk melawan korupsi maka masyarakat pun semangat untuk berpartisipasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Jaringan komunikasi berantas korupsi yang terjadi selama ini dalam masyarakat ada 2 yaitu jaringan komunikasi model rantai dan jaringan komunikasi model semua saluran atau biasa dikenal dengan model bintang. Jaringan komunikasi berantas korupsi model ini belum dapat berjalan secara maksimal karena hubungannya terputus dan pemimpinnya tidak jelas dan tegas sehingga informasi yang di dapat tidak dapat ditindak lanjuti karena tanpa ada perlindungan dari pemerintah bagi masyarakat.
2. Ditemukannya model jaringan komunikasi dengan pola A yang sederhana namun jelas

pemimpin dan timnya karena sengaja dibentuk dan berhak mendapatkan perlindungan dan pemerintah yang status mereka dianggap sebagai pegawai atau staf yang sengaja dibentuk sebagai tim pengawas atau perpanjangan tangan KPK yang bertugas mencari informasi dan melakukan pengawasan di birokrasi, instansi, dan masyarakat sehingga gerak gerik yang mencurigakan ke arah korupsi dapat dilacak dengan cepat dan baik.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Diharapkan kepada tokoh masyarakat atau LSM agar membentuk struktur jaringan komunikasi yang dapat bekerjasama secara baik dengan tim KPK yang ditempatkan di birokrasi maupun di masyarakat sehingga informasi tentang pelaku korupsi dapat ditindak lanjuti secara cepat dengan bukti-bukti yang kuat yang sudah didapatkan untuk diserahkan kepada KPK Pusat dan selanjutnya mereka akan segera menindaklanjutinya.
2. Pemilihan dan pengangkatan tim pembantu KPK dalam hal ini adalah komisi-komisi kecil KPK tentunya harus memiliki kriteria yang ketat terutama menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran sehingga dapat memberikan informasi yang benar dan tidak mudah dipengaruhi atau disogok oleh para koruptor.
3. Masyarakat Kota Bengkulu harus ikut berpartisipasi dalam memberantas korupsi dengan memberikan informasi yang akurat terkait kegiatan korupsi di masyarakat dengan syarat masyarakat juga mendapatkan perlindungan dari KPK Pusat dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Beebe, S.A dan J.T Masterson, (1994). *Communicating in Small Groups; Principles and Practices*. New York: Harper Collinc College Publisher.
- Devito. (1997). *Komunikasi Antar Manusia: Kuliah Dasar* (Ed) alih Bahasa Agus Maulana. Jakarta: Profession Books.
- Ellyta. (2006). *Analisis Jaringan Komunikasi Petani Dalam Pemasaran Lidah Buaya*. Tesis. Institut Pertanian Bogor.
- Jahi, Amri. (2008). *Komunikasi massa dan pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prodjohamidjojo, M. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi* (UU No. 31 Tahun 1999), Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Rogers, Everett M. And R.A Roger. (1983). *Communication in Organization*. New york: The Free Press.
- Rogers, Everett M and D.Lawrence Kincaid, (1981). *Communication Network: Toward a new Paradigm for Research*. Ohio: The Free Press McMillan Publishing, Inc.

PERATURAN – PERUNDANG – UNDANGAN DAN KONVENSII

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak-Pidana Korupsi.

INTERNET

<https://kumparan.com/wisnu-prasetyo/kpk-tangkap-gubernur-bengkulu-dan-istrinya-semua-yang-perlu-anda-tahu>

